PUBLISITAS
Journal of Social Sciences and Politics

Volume 13 Nomor 1, October 2026
P-ISSN: 2252-4150
E-ISSN: 2716-3474

KETIMPANGAN DIGITAL SEBAGAI MEKANISME REPRODUKSI KETIMPANGAN SOSIAL: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR

DIGITAL INEQUALITY AS A MECHANISM OF SOCIAL INEQUALITY REPRODUCTION: A LITERATURE REVIEW

Rahmi Novianti [1], Wagisri [2], Indah Pusnita [3*], Marleni [4]

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, STISIPOL Candradimuka, Indonesia [1,2,3]
Program Studi Ilmu Komunikasi, STISIPOL Candardimuka, Indonesia [4]

**Corresponding author*: *indah.pusnita@stisipolcandradimuka.ac.id*

ARTICLE INFO
Submitted:
July 4, 2026
Review:
August 27, 2026
Accepted:
October 19, 2026
Available online:
October 31, 2026

Article Citation (APA) :
Novianti, R., Wagisri, W., & Pusnita, I. (2026). KETIMPANGAN DIGITAL SEBAGAI MEKANISME REPRODUKSI KETIMPANGAN SOSIAL: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR. *Jurnal Publisitas*, *13*(1), 182-191. https://doi.org/10.37858/publisitas.v13i1.818

DOI: *https://doi.org/10.37858/publisitas.v13i1.818*

ABSTRAK

Transformasi digital memperluas akses informasi dan kesempatan sosial, tetapi tidak selalu menghasilkan distribusi manfaat yang setara. Penelitian ini bertujuan menjelaskan mekanisme reproduksi ketimpangan sosial melalui akses material, keterampilan digital, pemanfaatan informasi, dan hasil penggunaan teknologi. Dengan pendekatan tinjauan literatur integratif, penelitian menyintesis 25 artikel unik dari korpus literatur tentang ketimpangan digital, eksklusi sosial, dan pelayanan kesejahteraan. Analisis tematik menemukan empat jalur yang saling berkaitan: stratifikasi sumber daya awal, disparitas kapabilitas digital, diferensiasi hasil penggunaan, dan eksklusi yang dibentuk oleh desain layanan. Hubungan tersebut bersifat berulang karena manfaat digital yang tidak merata dapat memengaruhi kesempatan memperoleh sumber daya pada tahap berikutnya. Kajian ini menawarkan model konseptual yang menghubungkan kajian komunikasi digital dengan orientasi keadilan dan keberfungsian sosial. Strategi inklusi digital perlu bergerak melampaui indikator konektivitas menuju kesetaraan kapabilitas, manfaat, dan akses layanan yang responsif terhadap kerentanan masyarakat.

Kata Kunci: ketimpangan digital; reproduksi ketimpangan sosial; eksklusi digital; literasi digital; kesejahteraan sosial

ABSTRACT

Digital transformation expands access to information and social opportunities without necessarily distributing benefits equally. This article examines how unequal material access, digital skills, information practices, and digital outcomes may reproduce social inequality. An integrative literature review synthesizes 25 unique papers on digital inequality, social exclusion, and digital welfare. Thematic analysis identifies four intertwined pathways: pre-existing resource stratification, unequal digital capabilities, differentiated outcomes, and exclusion embedded in service design. These processes may be self-reinforcing when unequal digital returns shape future access to resources and opportunities. The article proposes a conceptual mechanism connecting communication scholarship with social welfare concerns, particularly social functioning and justice. Digital inclusion policies should therefore move beyond connectivity targets to address capabilities, meaningful outcomes, and accessible services for vulnerable groups.

Keywords*: digital inequality; social inequality reproduction; digital exclusion; digital literacy; social welfare*

Copyright © (2026) Jurnal Publisitas, P-ISSN: 2252-4150, E-ISSN: 2716-3474
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah bagaimana masyarakat mengakses informasi, berkomunikasi, belajar, bekerja, dan berhubungan dengan institusi pelayanan. Konektivitas semakin menjadi prasyarat untuk mengakses kesempatan sosial, namun perubahan tersebut tidak berlangsung di atas kondisi sosial yang seragam. Halford dan Savage (2010) menegaskan bahwa ketimpangan digital perlu dipahami dalam kaitannya dengan konfigurasi ketimpangan sosial, bukan sebagai fenomena teknologi yang terpisah. Perspektif ini menempatkan transformasi digital sebagai arena tempat sumber daya dan posisi sosial berinteraksi dengan perangkat, keterampilan, dan platform.

Di Indonesia, proporsi penduduk yang mengakses internet meningkat dari 69,21% pada 2023 menjadi 72,78% pada 2024 (Badan Pusat Statistik, 2025). Peningkatan ini mencerminkan perluasan konektivitas, tetapi indikator agregat belum cukup untuk menjelaskan perbedaan kualitas perangkat, kompetensi pengguna, dan hasil yang diperoleh. Pertanyaan pemerataan menjadi penting karena akses informasi, pekerjaan, dan pelayanan publik semakin bergantung pada sarana digital. Dalam situasi demikian, keterhubungan dengan internet merupakan kondisi yang diperlukan untuk banyak aktivitas, tetapi belum tentu mencukupi untuk memperoleh manfaat sosial-ekonomi yang setara.

Kesenjangan konektivitas tersebut tampak ketika data dibedakan menurut wilayah. Berdasarkan tabel statistik BPS (2025b), pada 2024 persentase penduduk berumur lima tahun ke atas yang mengakses internet di Sumatera Selatan mencapai 80,34% di perkotaan, tetapi hanya 64,50% di perdesaan, atau berselisih 15,84 poin persentase; angka gabungan provinsi sebesar 70,54%. Disparitas ini menunjukkan bahwa perluasan konektivitas nasional berjalan berdampingan dengan perbedaan kesempatan mengakses internet antarwilayah. Dalam kerangka Halford dan Savage (2010), perbedaan tersebut perlu dipahami bersama distribusi sumber daya dan kesempatan sosial, bukan semata sebagai perbedaan teknis jaringan.

Ketimpangan juga perlu ditelaah pada tingkat kemampuan dan pemanfaatan. Laporan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2025 menunjukkan peningkatan nilai nasional dari 43,18 pada 2023 dan 43,34 pada 2024 menjadi 44,53 pada 2025 (Kementerian Komunikasi dan Digital, 2025). Namun, komposisi tahun 2025 belum merata: pilar infrastruktur dan ekosistem mencapai 53,06, literasi digital 49,28, pekerjaan 42,91, dan pemberdayaan 34,32. Selisih 18,74 poin indeks antara infrastruktur dan pemberdayaan memperlihatkan ketidakseimbangan antardimensi kesiapan digital. Karena pilar-pilar tersebut merupakan konstruk berbeda, selisihnya tidak dapat ditafsirkan sebagai ukuran langsung jumlah penduduk yang tereksklusi; data ini menjadi petunjuk konteks untuk menelaah kesenjangan antara tersedianya sarana dan kemampuan mengubahnya menjadi manfaat sosial.

Konsep kesenjangan digital mencakup lebih dari siapa yang mempunyai koneksi. Tinjauan Scheerder et al. (2017) menjelaskan pembedaan antara kesenjangan keterampilan/penggunaan dan kesenjangan hasil yang diperoleh dari aktivitas daring, sedangkan van Deursen dan van Dijk (2019) menunjukkan bahwa akses material yang berkualitas tetap penting. Tiga dimensi ini perlu dibaca sebagai keterkaitan antarkondisi, bukan urutan deterministik yang selalu dilalui semua individu. Lutz (2019) menambahkan relevansi dimensi baru kesenjangan dalam ekosistem kecerdasan buatan dan data besar.
Literatur dalam koleksi juga memperlihatkan bahwa perbedaan akses dan kemampuan berhubungan dengan kondisi ekonomi dan struktur sosial. Tewathia et al. (2020)

membahas keberulangan kesenjangan digital dalam konteks ketidaksetaraan sosial, sementara Rodríguez-Camacho et al. (2024) menempatkan modal digital dalam pembacaan status sosial. Dalam konteks Indonesia, Irawan et al. (2024) meneliti kaitan ketimpangan digital dengan peluang kewirausahaan, dan Choczyńska (2024) mengangkat pendekatan interseksional untuk memahami disparitas digital. Penelitian-penelitian tersebut menjadi titik awal untuk membaca hubungan antara sumber daya sosial awal dan kemampuan memperoleh manfaat teknologi.

Eksklusi digital juga bersifat institusional: sistem pelayanan berbasis digital dapat mensyaratkan keterampilan dan sumber daya yang tidak tersedia bagi seluruh pengguna. Schou dan Pors (2019), melalui kajian kualitatif pelayanan kesejahteraan yang didigitalisasi, menunjukkan tuntutan baru yang dialami warga dalam sistem layanan mandiri. Park dan Humphry (2019) menjelaskan bagaimana desain sistem berpotensi menghubungkan eksklusi sosial, digital, dan data. Karena itu, hambatan digital tidak selalu dapat dijelaskan sebagai kurangnya kemauan atau keterampilan individu.

Secara sosial, manfaat pemanfaatan internet tidak selalu identik dengan intensitas penggunaan. Studi Yasmine et al. (2025b) mengenai kesejahteraan digital pemuda menunjukkan pentingnya memperhatikan dampak positif sekaligus negatif aktivitas daring; penelitian Yasmine et al. (2025a) pada pemuda perkotaan Jakarta menekankan hubungan keterampilan, keterlibatan, dan hasil digital dalam konteks Global South. Hal ini menguatkan urgensi analisis distribusi manfaat yang melibatkan kualitas informasi, kompetensi komunikasi, dan kesempatan sosial di luar layar.

Dari sudut kesejahteraan sosial, fokus perlu bergeser pada keberfungsian sosial, akses kesempatan dan pelayanan, serta perlindungan kelompok rentan. Keterbatasan digital berpotensi meningkatkan biaya pencarian informasi, memperpanjang ketergantungan pada perantara, atau menghambat akses layanan ketika saluran nondigital berkurang. Estrela et al. (2023) mengaitkan karakteristik sosiodemografis dengan literasi kesehatan digital, sedangkan López-Aguado et al. (2022) menempatkan eksklusi sosial berdampingan dengan kesenjangan digital.

Penelitian terdahulu mengungkap bahwa keterkaitan antara stratifikasi sosial dan ketimpangan digital bukanlah persoalan baru (Halford & Savage, 2010; Tewathia et al., 2020). Namun, kajian tersebut tersebar pada berbagai tingkat analisis: kapabilitas dan hasil penggunaan, posisi sosial, layanan kesejahteraan, dan konteks perdesaan. Ruang kontribusi artikel ini terletak pada integrasi mekanisme antar-tingkat tersebut melalui perspektif komunikasi dan kesejahteraan sosial, bukan pada klaim bahwa digitalisasi selalu meningkatkan ketimpangan. Sintesis juga memberi perhatian pada desain institusi dan dukungan sosial sebagai faktor yang dapat memperkuat atau meredam dampak ketimpangan digital.

Artikel ini mengajukan tiga pertanyaan: (1) bagaimana ketimpangan sumber daya sosial terhubung dengan akses, kompetensi, dan hasil digital; (2) melalui jalur apa ketimpangan digital dapat memperpanjang ketimpangan sosial; dan (3) implikasi apa yang ditawarkan perspektif komunikasi serta kesejahteraan sosial bagi kebijakan inklusi digital. Tujuannya ialah menyusun sintesis mekanisme yang didukung literatur tanpa menyatakan adanya hubungan kausal universal.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan tinjauan literatur integratif untuk mempertemukan studi konseptual, survei, penelitian kualitatif, dan telaah literatur dalam satu kerangka analisis

(Whittemore & Knafl, 2005). Korpus analisis berasal dari kumpulan dokumen bertema digital society yang terdiri atas 26 berkas PDF. Satu dokumen berulang diidentifikasi berdasarkan kesamaan judul dan isi sehingga unit kajian mencakup 25 artikel unik. Semua artikel digunakan untuk pemetaan tema, sedangkan argumen utama bertumpu pada penelitian yang secara langsung menjelaskan kesenjangan digital, hasil penggunaan teknologi, eksklusi layanan, serta hubungan dengan struktur sosial. Dengan demikian, penelitian ini merupakan sintesis berbasis korpus terhimpun, bukan tinjauan sistematis yang mengklaim mencakup seluruh publikasi dalam suatu pangkalan data.

Analisis dilakukan melalui empat tahapan: identifikasi unit artikel dan deduplikasi; ekstraksi tujuan, konteks, pendekatan, temuan, dan keterbatasan ke dalam matriks; pengodean tematik lintas artikel; serta sintesis mekanisme dan implikasi kebijakan. Kategori awal mencakup sumber daya sosial, akses material, keterampilan dan praktik komunikasi, hasil penggunaan, desain kelembagaan, serta konsekuensi pada kesempatan sosial. Tema diperbandingkan secara iteratif untuk menilai persamaan, perbedaan konteks, dan hubungan antarproses. Kajian empiris ditempatkan sebagai bukti yang terikat pada populasi masing-masing; generalisasi lintas negara tidak diperlakukan sebagai estimasi kausal untuk Indonesia.

Sebagai konteks nasional, digunakan indikator penggunaan internet dari Statistik Telekomunikasi Indonesia 2024 (Badan Pusat Statistik, 2025). Data ini dipakai untuk memperlihatkan skala transformasi konektivitas, bukan untuk mengukur dampak sebab-akibat kesenjangan digital terhadap kesejahteraan. Validitas sintesis dijaga dengan membedakan temuan penelitian yang dikutip, interpretasi penulis, dan implikasi normatif kebijakan. Hasil disajikan sebagai pola hubungan konseptual yang membutuhkan pengujian empiris dalam penelitian lanjutan.

Selain literatur yang ditelaah, pembahasan menggunakan data sekunder resmi mengenai persentase penduduk yang mengakses internet menurut wilayah (Badan Pusat Statistik, 2025a, 2025b) dan nilai antarpilar IMDI 2025 (Kementerian Komunikasi dan Digital, 2025). Kedua jenis indikator digunakan secara deskriptif untuk mengontekstualisasikan sintesis, tanpa menggabungkan keduanya menjadi ukuran tunggal atau melakukan inferensi kausal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan literatur dan pergeseran makna ketimpangan digital

Pemetaan menunjukkan empat rumpun kajian yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan stratifikasi sosial memandang teknologi sebagai bagian dari struktur ketidaksetaraan yang telah berkembang sebelumnya (Halford & Savage, 2010; Tewathia et al., 2020). Kedua, kajian keterampilan, penggunaan, dan luaran internet memindahkan fokus dari kepemilikan akses menuju kualitas partisipasi digital (Yasmine et al., 2025a, 2025b). Ketiga, studi modal digital mengaitkan akumulasi kompetensi dan jejaring berbasis teknologi dengan posisi sosial (Rodríguez-Camacho et al., 2024). Keempat, penelitian pelayanan digital menemukan bahwa desain kelembagaan dapat menghambat kelompok yang kurang memiliki sumber daya teknis dan administratif (Schou & Pors, 2019; Park & Humphry, 2019). Dari keempat rumpun tersebut, kesenjangan digital lebih tepat dipahami sebagai proses bertingkat daripada pemisahan sederhana antara pengguna dan bukan pengguna internet.

Ketimpangan akses dan kapasitas sebagai prasyarat manfaat

Akses material tidak sebatas keberadaan sinyal atau kepemilikan telepon seluler. Ia meliputi kualitas perangkat, keterjangkauan paket data, ruang penggunaan yang aman, dan tersedianya bantuan ketika terjadi gangguan. Di tingkat rumah tangga, kondisi ekonomi dan pendidikan memengaruhi pilihan perangkat serta peluang memperoleh pendampingan. Tewathia et al. (2020) menunjukkan keterkaitan kesenjangan digital dengan ketidaksetaraan mendasar pada konteks India, sedangkan Priyadharma (2024) memperlihatkan pentingnya praktik digital sehari-hari di desa Indonesia yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan indikator infrastruktur. Dengan demikian, peningkatan jangkauan jaringan penting tetapi tidak otomatis menghapus ketimpangan penggunaan yang bermakna.

Sebagai ilustrasi ketimpangan akses material menurut tempat tinggal, data BPS (2025b) memperlihatkan persentase akses internet penduduk usia lima tahun ke atas di Sumatera Selatan pada 2024 sebesar 80,34% di perkotaan dan 64,50% di perdesaan. Perbedaan 15,84 poin persentase tersebut sejalan dengan argumen Priyadharma (2024) bahwa pengalaman masyarakat perdesaan dan wilayah pinggiran memerlukan perhatian tersendiri dalam pembacaan inklusi digital. Data akses ini tidak langsung menggambarkan kualitas perangkat ataupun kemampuan pengguna, tetapi memperlihatkan kondisi awal yang berbeda dalam partisipasi digital.

Komposisi IMDI 2025 memberi gambaran pelengkap pada aspek kapabilitas. Nilai literasi digital sebesar 49,28 berada di bawah infrastruktur dan ekosistem sebesar 53,06 (Kementerian Komunikasi dan Digital, 2025). Perbandingan tersebut perlu dibaca sebagai skor dua pilar indeks, bukan perbedaan tingkat keterampilan pada individu yang sama. Secara konseptual, temuan ini relevan dengan Yasmine et al. (2025a), yang menekankan pentingnya keterampilan serta keterlibatan digital untuk memahami perolehan hasil penggunaan internet.

Indikator	Tahun	Nilai	Keterangan
Akses internet Indonesia	2023 / 2024	69,21% / 72,78%	Persentase penduduk; Susenas
Sumatera Selatan—perkotaan	2024	80,34%	Penduduk usia ≥5 tahun
Sumatera Selatan—perdesaan	2024	64,50%	Penduduk usia ≥5 tahun
IMDI nasional	2025	44,53	Skala indeks 0–100
Infrastruktur dan ekosistem	2025	53,06	Pilar IMDI
Literasi digital	2025	49,28	Pilar IMDI
Pekerjaan	2025	42,91	Pilar IMDI
Pemberdayaan	2025	34,32	Pilar IMDI

Tabel 1. Indikator kontekstual akses dan kesiapan digital Indonesia. Sumber: BPS (2025a, 2025b) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (2025). Indikator berasal dari pengukuran yang berbeda dan tidak menunjukkan hubungan kausal.

Pada tingkat kedua, perbedaan kemampuan mengidentifikasi informasi yang relevan, memahami risiko, menggunakan layanan daring, dan menyampaikan kebutuhan

melalui saluran digital menentukan peluang memanfaatkan akses. Studi Yasmine et al. (2025a) pada pemuda Jakarta memperlihatkan relevansi keterampilan, keterlibatan, dan hasil penggunaan dalam konteks Global South. Keterampilan digital juga perlu dipahami sebagai praktik sosial: pengguna memerlukan waktu, kepercayaan diri, kemampuan bahasa, dan dukungan interpersonal. Oleh sebab itu, dari perspektif komunikasi, persoalan ketimpangan bukan hanya kemampuan mengoperasikan aplikasi, melainkan kemampuan menerjemahkan informasi menjadi tindakan yang sesuai tujuan dan konteks sosial pengguna.

Dalam pembacaan lintas studi, temuan harus dipahami menurut konteksnya: penelitian pada kelompok pemuda perkotaan tidak mewakili keseluruhan populasi Indonesia, sementara studi pelayanan kesejahteraan negara lain tidak langsung menggambarkan prosedur layanan di Indonesia. Justru perbandingan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme ketimpangan dapat serupa—hambatan material, keterampilan, dan institusional—namun intensitas serta manifestasinya ditentukan kondisi lokal. Analisis ini menempatkan konteks sebagai penjelas, bukan gangguan yang diabaikan demi satu kesimpulan universal.

Distribusi manfaat teknologi dan eksklusi kesempatan sosial

Tingkat ketiga menjelaskan distribusi hasil: dua pengguna yang sama-sama aktif secara daring dapat memperoleh manfaat yang berbeda. Dalam kajian kewirausahaan Indonesia, Irawan et al. (2024) memperlihatkan relevansi ketimpangan digital pada peluang wirausaha; penelitian Yasmine et al. (2025b) menunjukkan bahwa manfaat maupun konsekuensi negatif penggunaan teknologi penting bagi kesejahteraan subjektif pemuda. Modal digital juga berhubungan dengan status sosial dan dipengaruhi latar pendidikan, usia, jejaring, dan pengalaman digital (Rodríguez-Camacho et al., 2024). Sintesis ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa intensitas koneksi bukan ukuran yang cukup: yang lebih substantif adalah peluang mengonversi aktivitas digital menjadi keuntungan pendidikan, ekonomi, relasional, dan akses pelayanan.

Ketidakseimbangan antarpilar IMDI memberikan konteks nasional bagi persoalan distribusi manfaat tersebut. Pada 2025, skor pemberdayaan sebesar 34,32 merupakan yang terendah dibandingkan pekerjaan (42,91), literasi digital (49,28), serta infrastruktur dan ekosistem (53,06) (Kementerian Komunikasi dan Digital, 2025). Skor ini bukan ukuran langsung kesejahteraan rumah tangga atau bukti bahwa akses internet menyebabkan ketimpangan pendapatan. Akan tetapi, pola tersebut konsisten dengan kebutuhan untuk menilai capaian digital melalui kemampuan pemanfaatan dan kegiatan produktif, sebagaimana ditekankan dalam studi kewirausahaan digital oleh Irawan et al. (2024) dan pembahasan modal digital oleh Rodríguez-Camacho et al. (2024).

Pada ranah pelayanan kesejahteraan, eksklusi tidak selalu berasal dari keterbatasan individu. Schou dan Pors (2019), berdasarkan kajian di Denmark, menunjukkan bagaimana prinsip layanan digital sebagai standar mengubah tuntutan administratif dan dapat membebani warga yang sudah rentan. Park dan Humphry (2019) menjelaskan bahwa desain sistem dan tata kelola data dapat menciptakan eksklusi bahkan ketika platform dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi. Temuan ini memperluas analisis ketimpangan digital dari kompetensi pengguna menuju relasi antara warga dan institusi. Kemampuan menyelesaikan formulir daring, mengunggah dokumen, atau menerima pemberitahuan digital dapat berubah menjadi prasyarat menikmati hak layanan; ketika bantuan manusia

dan kanal alternatif berkurang, hambatan teknis berpotensi menjadi hambatan kesejahteraan.

Mekanisme reproduksi ketimpangan sosial: sintesis tematik

Sintesis menghasilkan mekanisme berantai dengan empat simpul. Pertama, stratifikasi awal—pendapatan, pendidikan, usia, tempat tinggal, dan jaringan sosial—mempengaruhi daya beli perangkat serta peluang memperoleh pendampingan (Halford & Savage, 2010; Tewathia et al., 2020). Kedua, ketimpangan akses membentuk ruang latihan dan penguasaan keterampilan, sehingga keterhubungan internet tidak otomatis melahirkan kompetensi yang sebanding. Ketiga, perbedaan keterampilan, strategi penggunaan, dan sumber dukungan menghasilkan distribusi manfaat digital yang berbeda, sebagaimana dibahas dalam riset pemuda Indonesia (Yasmine et al., 2025b). Keempat, institusi dapat memperbesar disparitas ketika desain layanan mensyaratkan kapasitas yang tidak dimiliki semua kelompok (Schou & Pors, 2019; Park & Humphry, 2019). Keempat simpul ini tidak harus berlangsung linear; hubungan di antaranya dapat dipengaruhi desain kebijakan dan dukungan sosial.

Reproduksi ketimpangan terjadi ketika perbedaan manfaat dan peluang tidak berhenti sebagai hasil sesaat, tetapi ikut menentukan modal sosial-ekonomi untuk tahap kehidupan berikutnya. Pihak yang memperoleh manfaat pendidikan, ekonomi, atau jejaring dari teknologi berpeluang mengakumulasi sumber daya tambahan; sebaliknya, kelompok dengan hambatan berulang dapat semakin tertinggal pada bidang yang bergantung pada akses digital. Bukti tentang akumulasi modal digital (Rodríguez-Camacho et al., 2024) dan ketidaksetaraan yang berulang (Tewathia et al., 2020) mendukung rasionalitas mekanisme ini. Akan tetapi, hubungan siklik tersebut merupakan hasil sintesis konseptual, bukan pembuktian bahwa setiap adopsi digital memperburuk ketimpangan. Intervensi publik, jaringan komunitas, dan layanan yang inklusif dapat memutus rantai tersebut.

Tahap mekanisme	**Proses utama**	**Kemungkinan konsekuensi / referensi**
1. Sumber daya awal	Kondisi sosial menentukan ruang akses yang layak	Halford & Savage (2010); Tewathia et al. (2020)
2. Akses material	Perbedaan perangkat, jaringan dan dukungan	Hidayanto et al. (2026); Priyadharma (2024)
3. Kapabilitas	Perbedaan keterampilan, komunikasi, pemanfaatan	Kopuz et al. (2025); Yasmine et al. (2025b)
4. Manfaat	Keuntungan digital tidak terdistribusi sama	Irawan et al. (2024); Yasmine et al. (2025a)
5. Konversi sosial	Dampak pada kesempatan dan akses layanan	Yaqin et al. (2026); Schou & Pors (2019)
6. Umpan balik	Keunggulan/kerugian baru memengaruhi sumber daya berikutnya	Hipotesis sintesis; verifikasi longitudinal diperlukan

Model sintesis: KETIMPANGAN SUMBER DAYA SOSIAL → AKSES MATERIAL YANG TIDAK SETARA → KESENJANGAN KAPABILITAS DAN KOMUNIKASI → KESENJANGAN MANFAAT DIGITAL → PERBEDAAN KESEMPATAN SOSIAL-EKONOMI → POTENSI REPRODUKSI KETIMPANGAN. Arah umpan balik muncul ketika manfaat digital mengubah sumber daya

yang tersedia untuk partisipasi berikutnya. Desain layanan, dukungan komunitas, dan kebijakan inklusi ditempatkan sebagai kondisi yang dapat memperkuat atau meredam setiap mata rantai.

Ketika indikator BPS dan IMDI diposisikan bersama, tampak dua gejala yang berbeda tetapi saling relevan bagi model sintesis: akses belum merata antarwilayah, dan nilai pemberdayaan digital lebih rendah daripada nilai infrastruktur pada tingkat nasional (Badan Pusat Statistik, 2025b; Kementerian Komunikasi dan Digital, 2025). Data agregat ini tidak menunjukkan bahwa kelompok perdesaan yang kurang terhubung pasti memiliki skor pemberdayaan lebih rendah karena kedua indikator berasal dari pengukuran yang berbeda. Namun, keduanya memperkuat alasan analitis untuk membedakan akses, kapabilitas, dan hasil sebagai tiga mata rantai yang tidak boleh disamakan dalam menjelaskan potensi reproduksi ketimpangan sosial.

Implikasi untuk kebijakan inklusi digital dan kesejahteraan sosial

Perspektif komunikasi menekankan bahwa inklusi digital membutuhkan lebih dari penyediaan perangkat: masyarakat perlu mampu menemukan, mengevaluasi, memahami, dan menyampaikan informasi secara efektif. Perspektif kesejahteraan sosial mengalihkan ukuran keberhasilan pada akses yang setara terhadap hak, layanan, perlindungan, dan kesempatan menjalankan fungsi sosial. Kombinasi keduanya menghindari dua reduksionisme: menganggap semua masalah sebagai kekurangan keterampilan individu atau menganggap perluasan jaringan sebagai solusi tunggal. Studi pelayanan digital menunjukkan bahwa eksklusi juga diproduksi oleh persyaratan dan rancangan institusi (Schou & Pors, 2019; Park & Humphry, 2019). Oleh karena itu, evaluasi program perlu memperhatikan pengalaman pengguna yang paling rentan, termasuk keberhasilan menyelesaikan layanan dan manfaat yang benar-benar diperoleh.

Implikasi kebijakan dapat dirumuskan pada tiga tingkat. Pada tingkat material, dukungan perlu mencakup perangkat, biaya akses, dan infrastruktur yang andal, terutama di wilayah dengan hambatan konektivitas. Pada tingkat kapabilitas, pembelajaran literasi informasi sebaiknya kontekstual, melibatkan kelompok komunitas, serta memperhatikan kebutuhan pengguna yang berbeda. Pada tingkat institusional, platform pelayanan perlu dirancang dengan bahasa yang dapat dipahami, prosedur yang sederhana, standar aksesibilitas, bantuan tatap muka, dan kanal alternatif yang efektif. Maceviciute dan Wilson (2018) menunjukkan pentingnya mempertimbangkan berbagai sarana untuk mengurangi ketimpangan digital, sedangkan Priyadharma (2024) mengingatkan agar strategi tidak mengabaikan pengalaman masyarakat di wilayah pinggiran. Ukuran keberhasilan kebijakan dengan demikian perlu bergerak dari jumlah pengguna menuju pemerataan kapabilitas, penyelesaian layanan, dan manfaat sosial.

Dalam evaluasi kebijakan, statistik konektivitas BPS dapat digunakan untuk memetakan kesenjangan antarwilayah, sedangkan indikator IMDI membantu mengidentifikasi dimensi penguatan masyarakat digital yang relatif tertinggal. Mengingat skor pemberdayaan 2025 sebesar 34,32 berada di bawah infrastruktur dan ekosistem sebesar 53,06, program perlu dinilai bukan hanya dari pembangunan jaringan, tetapi juga dari keterampilan yang dapat diterapkan, akses pada peluang produktif, dan keberhasilan menggunakan layanan (Kementerian Komunikasi dan Digital, 2025). Dari perspektif kesejahteraan sosial, pengukuran tersebut sebaiknya dilengkapi perhatian terhadap kelompok yang memerlukan pendampingan dan alternatif layanan nondigital agar capaian agregat tidak menutupi hambatan individual.

Keterbatasan sintesis dan agenda penelitian

Kajian ini memiliki batasan pada sifat korpus terhimpun, keragaman desain penelitian, dan konteks yang tidak selalu dapat diperbandingkan. Karena tidak menggunakan protokol penelusuran basis data secara menyeluruh atau meta-analisis, temuan tidak dimaksudkan sebagai estimasi besaran dampak atau prevalensi ketimpangan digital. Model yang ditawarkan perlu diuji melalui studi longitudinal dan penelitian komparatif di Indonesia, terutama pada kelompok berpendapatan rendah, lansia, masyarakat perdesaan, serta pengguna layanan kesejahteraan. Studi berikutnya juga perlu menguji apakah pendampingan, layanan hibrida, dan desain antarmuka inklusif secara nyata mengurangi perbedaan hasil digital.

KESIMPULAN

Ketimpangan digital merupakan proses sosial bertingkat yang menghubungkan distribusi sumber daya awal, akses material, kapabilitas komunikasi, dan hasil penggunaan teknologi. Sintesis literatur menunjukkan bahwa kesenjangan manfaat digital dapat mempertahankan ketimpangan kesempatan ketika kelompok yang lebih diuntungkan mampu mengakumulasi sumber daya, sementara kelompok rentan menghadapi hambatan yang berulang. Eksklusi tidak semata disebabkan keterampilan individu, tetapi dapat diproduksi oleh desain pelayanan dan tuntutan administratif berbasis digital. Artikel ini menawarkan model reproduksi ketimpangan melalui interaksi antara sumber daya sosial, kapabilitas digital, hasil penggunaan, dan kelembagaan. Implikasi utamanya ialah perlunya kebijakan inklusi digital yang mengukur pemerataan manfaat dan keberhasilan akses layanan, selain konektivitas. Pengujian empiris lintas kelompok sosial diperlukan untuk menguji arah dan kekuatan hubungan dalam model tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2025a). Statistik telekomunikasi Indonesia 2024. Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/id/publication/2025/08/29/beaa2be400eda6ce6c636ef8/telecommunication-statistics-in-indonesia-2024.html

Badan Pusat Statistik. (2025b). Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet selama tiga bulan terakhir menurut provinsi dan tipe daerah, 2024 [Tabel statistik]. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjU2IzI%3D/persentase-penduduk-berumur-5-tahun-ke-atas-yang-mengakses-internet-selama-tiga-bulan-terakhir--menurut-provinsi-dan-tipe-daerah.html

Halford, S., & Savage, M. (2010). Reconceptualizing digital social inequality. Information, Communication & Society. https://doi.org/10.1080/1369118X.2010.499956

Irawan, A., Yendra, Sutisna, E., Marihi, L., Mardatillah, & Soelistya, D. (2024). Digital inequality and digital entrepreneurship in Indonesia. Jurnal Aplikasi Manajemen, 22(1), 193–204. https://doi.org/10.21776/ub.jam.2024.022.01

Kementerian Komunikasi dan Digital. (2025). Indeks Masyarakat Digital Indonesia 2025. https://bpsdm.komdigi.go.id/downloads/19/20251003065319-Indeks-Masyarakat-Digital-Indonesia-IMDI-2025-E-book.pdf

Maceviciute, E., & Wilson, T. D. (2018). Digital means for reducing digital inequality: Literature review. Informing Science: The International Journal of an Emerging Transdiscipline, 21, 269–287. https://doi.org/10.28945/4117

Park, S., & Humphry, J. (2019). Exclusion by design: Intersections of social, digital and data exclusion. Information, Communication & Society, 22(7), 934–953. https://doi.org/10.1080/1369118X.2019.1606266

Priyadharma, S. (2024). "Periphery-centric" approach as a tactic for everyday digital in- and exclusion of Indonesian villages. Media and Communication, 12, Article 8162. https://doi.org/10.17645/mac.8162

Rodríguez-Camacho, J. A., Linder, M., Jütte, D., & Hennig-Thurau, T. (2024). Digital capital: Importance for social status in contemporary society and antecedents of its accumulation. Computers in Human Behavior, 159, Article 108316. https://doi.org/10.1016/j.chb.2024.108316

Schou, J., & Pors, A. S. (2019). Digital by default? A qualitative study of exclusion in digitalised welfare. Social Policy & Administration, 53(3), 464–477. https://doi.org/10.1111/spol.12470

Tewathia, N., Kamath, A., & Ilavarasan, P. V. (2020). Social inequalities, fundamental inequities, and recurring of the digital divide: Insights from India. Technology in Society, 61, Article 101251. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101251

Whittemore, R., & Knafl, K. (2005). The integrative review: Updated methodology. Journal of Advanced Nursing, 52(5), 546–553. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x

Yasmine, D. I., Colombijn, F., van Deursen, A. J. A. M., & van Ingen, E. (2025a). Internet skills, digital engagement, and outcomes among urban youth in Jakarta, Indonesia: Incorporating a Global South context in measuring digital inequality. Information, Communication & Society, 28(15), 2774–2794. https://doi.org/10.1080/1369118X.2025.2479778

Yasmine, D. I., Colombijn, F., van Deursen, A. J. A. M., & van Ingen, E. (2025b). Youth digital well-being: The role of digital skills and positive and negative digital outcomes in youth's subjective well-being. Computers in Human Behavior Reports. https://doi.org/10.1016/j.chbr.2025.100796